

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan sosial. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kekurangan uang dan pendapatan rendah. Menurut Rintuh (2003) kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya.

Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk menyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah pusat mengharapkan dengan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab maka pemerintah daerah mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, karena lebih dekat dan dengan mudah memonitor dan mengevaluasi proyek apa saja yang kiranya tepat sesuai potensi masyarakat yang ada untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Kebijakan desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk dapat mengupayakan peningkatan kinerja ekonomi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Melalui pengenalan potensi baik ekonomi maupun non ekonomi yang dimiliki

oleh suatu daerah, nantinya akan memberikan konsekuensi yang positif terhadap pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi akan dapat terus berkembang dan meningkat. Dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bireuen yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Aceh seperti kabupaten Aceh Besar, Aceh tengah dan Aceh timur. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar adalah 62.400 jiwa. Aceh tengah sebesar 32.800 jiwa dan Kabupaten Aceh Timur sebesar 63.000 jiwa, Pada Tahun yang sama jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen adalah sebesar 72.200 Jiwa. BPS, (2016)

Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah. Permasalahan kemiskinan dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Wibowo (2014) faktor-faktor yang menjadi penentu kemiskinan yaitu, pertama, modal sumber daya manusia (human capital) yang diindikasikan dengan tingkat pendidikan, karena modal SDM merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kedua, status pekerjaan, dimana status pekerjaan akan memberikan dampak bagi pola pendapatan seseorang.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota dibedakan menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengeluaran pemerintah daerah yang dipergunakan baik dalam urusan wajib dan urusan pilihan menunjukkan alokasi pengeluaran di sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mencapai pembangunan. Hal ini dapat diketahui dari proporsi alokasi anggaran kedua sektor tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Peningkatan jumlah pengeluaran Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat yang harus untuk menekan angka kemiskinan saat ini.

Menurut Wibowo (2014) bahwa kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar seperti : pendidikan, dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemiskinan di dalam masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Wibowo (2014) menyebutkan bahwa salah satu untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup

efektif adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang penting pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah maupun nasional. Untuk mengamati Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Infrastuktur dan Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Bireuen Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan & Infrastuktur di Kabupaten Bireuen tahun 2013-2015**

Tahun	Pengeluaran Sektor Pendidikan (Rp)	Pengeluaran Sektor Infrastruktur (Rp)	Penduduk Miskin (jiwa)
2013	454.840.910.784,00	185.638.618.870,00	74.800
2014	431.880.637.351,00	166.664.574.032,00	73.900
2015	556.743.084.586,00	188.779.717.890,00	72.200

Sumber: BPS Bireuen, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan sebesar Rp. 454.840.910.784,00, untuk sektor Infrastruktur sebesar Rp. 185.638.618.870,00 dan jumlah penduduk miskin sebanyak 74.800 jiwa. Sementara untuk tahun 2014 pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan menurun menjadi Rp. 431.880.637.351,00, begitu pula untuk sektor infrastruktur turun menjadi Rp. 166.664.574.032,00, hal ini disebabkan oleh menurunnya belanja langsung pemerintah, sehingga realisasi untuk Pendidikan dan kesehatan juga menurun, sementara untuk jumlah penduduk miskin menurun menjadi 73.900 jiwa.

Kemudian pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat menjadi Rp. 556.743.084.586,00, begitu pula dengan pengeluaran

sektor Infrastruktur meningkat menjadi Rp. 166.664.574.032,00, dan jumlah penduduk Miskin Menurun menjadi 72.200 Jiwa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ditahun 2014, penurunan pengeluaran pemerintah justru tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin, fenomena ini tidak sejalan dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa peningkatan perhatian pemerintah di sektor Pendidikan dan Infrastruktur akan mengurangi jumlah penduduk miskin disuatu wilayah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bireuen”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bireuen.
2. Apakah Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bireuen.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bireuen.
2. Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastuktur

Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bireuen.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual guna mempertajam daya fikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam bidang Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

3. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang upaya mendorong perekonomian daerah, dan dapat pula dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut